**WANPRESTASI PIHAK NASABAH DALAM PERJANJIAN
KREDIT PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)
MEKAAR SYARIAH CABANG BANTARKALONG
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 AYAT (1) KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong
Kabupaten Tasikmalaya)**

Dita Nurpebrianty^{*)}
ditanurpebrianty@gmail.com

Ibnu Rusydi^{*)}
ibnurusydi@unigal.ac.id

Hendra Sukarman^{*)}
hendrasukarman74@gmail.com

ABSTRACT

An agreement is an event where someone promises to bind themselves to another person which gives rise to rights and obligations for the parties who make it. The agreement entered into by PT. PNM Mekaar Syariah Bantarkalong Branch and the customer, in implementing the agreement, there were problems related to fulfilling achievements in the form of being late in paying the installments that had been agreed upon, causing default by the customer. The problems identified are as follows: implementation of capital loans by customers at PT. Madani National Capital (PNM) Mekaar Syariah Bantarkalong Branch is linked to Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code (Case Study in Sirnagalih Village, Bantarkalong District, Tasikmalaya Regency); obstacles that cause customers to default on PT. Madani National Capital (PNM) Mekaar Syariah Bantarkalong Branch (Case Study in Sirnagalih Village, Bantarkalong District, Tasikmalaya Regency); and efforts to resolve defaults in credit agreements that occurred at PT. The Bantarkalong Branch of Mekaar Civil National Capital (PNM) is linked to Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code (Case Study in Sirnagalih Village, Bantarkalong District, Tasikmalaya Regency). In this research the author uses a type of empirical normative research, namely research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each particular legal event that occurs in society. Obstacles that cause customers to default are the poor economy, declining business conditions and increasing family needs. The efforts

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

made by PT. PNM Mekaar Syariah Bantarkalong Branch in dealing with customers who are in default is through joint responsibility, contacting close relatives or relatives who are guarantors, arranging to rescue problem loans before they are resolved through legal institutions, as well as through deliberation and kinship and through the Religious Courts. The advice that the author can give regarding this problem is for debtors to be responsible for their obligations, as well as for PT. PNM to be more careful and thorough in providing financing to customers, always monitoring the financing distributed.

Keywords: *Agreement; Breach of contract; Customer.*

ABSTRAK

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong dan nasabah dalam pelaksanaannya terdapat masalah terkait pemenuhan prestasi berupa terlambat membayar angsuran yang sudah diperjanjikan sehingga menyebabkan wanprestasi oleh pihak nasabah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu : pelaksanaan peminjaman modal oleh nasabah di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong dihubungkan dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya); kendala-kendala dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Bantarkalong dihubungkan dengan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya). Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kendala yang menjadi penyebab nasabah wanprestasi adalah kurang lancarnya perekonomian, menurunnya kondisi usaha bisnis dan peningkatan kebutuhan keluarga. Upaya yang dilakukan oleh pihak PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong dalam mengatasi nasabah yang wanprestasi adalah dengan tanggung renteng, menghubungi kerabat dekat atau kerabat yang menjadi penjamin, mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, serta secara musyawarah dan kekeluargaan dan melalui Pengadilan Agama. Saran yang diberikan bagi pihak debitur dapat bertanggungjawab terhadap kewajibannya, serta bagi pihak PT.PNM untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan.

Kata Kunci : Perjanjian; wanprestasi; Nasabah.

I. Pendahuluan

PT PNM Persero didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Serta diawasi oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

PT. PNM Persero merupakan satu wujud kepedulian pemerintah yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan UMKM. Koperasi tidak hanya melakukan penyaluran kredit sebagai modal bagi usaha kecil, namun PT. PNM Persero juga menyelenggarakan jasa pembinaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan usaha-usaha mikro kecil contohnya layanan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok.¹⁾ Pinjaman ini tanpa agunan sehingga para ibu-ibu bisa mengembangkan kehidupannya secara mandiri.

Adapun PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro.²⁾ Dalam hal ini jika terjadi kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya.³⁾

Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan nasabah di PT. PNM Mekaar Cabang Bantarkalong terdapat beberapa masalah terkait pemenuhan prestasi

¹⁾ Vina Yusepa Diana. 2022. Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. hlm.4. <http://repository.radenintan.ac.id/19205/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

²⁾ *Op. Cit.* <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

³⁾ Rahmani Timorita Yulianti. 2008. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1), 91. Diakses 31 Juli 2023. Doi : <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>

nasabah yang sudah diperjanjikan sehingga menyebabkan waprestasi oleh pihak nasabah. Bentuk waprestasi yang dilakukan oleh ibu Ayis, ibu Dedeh, dan ibu Sumiarsih selaku nasabah PT. PNM Mekaar Cabang Bantarkalong yang bertempat tinggal di Desa Sirnagalih, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya adalah melanggar kewajiban nasabah seperti halnya yang tercantum pada kewajiban nasabah poin b yaitu membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban berdasarkan harga jual. Berdasarkan poin tersebut nasabah di wilayah Desa Sirnagalih diwajibkan membayar angsuran setiap hari Kamis selama 50 minggu. Tetapi dalam pelaksanaannya ibu Ayis yang meminjam modal pada tanggal 20 September 2021 pada awalnya terlambat mengembalikan pinjaman selama 4 minggu kemudian setelah ditagih beberapa kali ibu Ayis membayar keterlambatannya tersebut, akan tetapi diminggu selanjutnya ibu Ayis kembali terlambat membayar pinjamannya atau angsurannya selama 2-4 minggu secara berulang hingga habis waktu pinjaman atau angsurannya. Adapun ibu Dedeh yang meminjam modal pada tanggal 23 Juni 2020 pada awalnya terlambat selama 2 minggu kemudian membayarnya akan tetapi nasabah mengulangi keterlambatannya di minggu selanjutnya selama 2-4 minggu secara berulang hingga habis waktu pinjaman atau angsurannya. Sama halnya dengan ibu Sumiarsih yang melakukan pinjaman pada tanggal 12 Februari 2021 pernah terlambat membayar angsuran selama 2 minggu, saat sudah membayar keterlambatan tersebut nasabah kembali terlambat membayar angsuran selama 3 minggu dan kejadian tersebut terus terjadi selama beberapa bulan hingga habis waktu angsuran.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Normatif Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen

tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

Buku III KUH Perdata mengatur tentang perikatan. Didalamnya dijelaskan bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan debitur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan kreditur atau si berutang.⁵⁾ Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak debitur itu dijamin oleh hukum atau undang-undang

Adapun perjanjian merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbinten*). Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu. Defenisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁶⁾

Dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan juga mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

⁴⁾ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. hlm.115.

⁵⁾ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia. hlm.1.

⁶⁾ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo : CV. Nata Karya. hlm..83.

Hal ini berkaitan dengan asas konsensualitas. Perjanjian terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan atau *consensus*. Sepakat maksudnya adalah bahwa dua belah pihak yang mengadakan perjanjian dengan kata lain mereka saling menghendaki sesuatu yang secara timbal balik. Adanya kemauan atas kesesuaian kehendak oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, Jadi tidak boleh hanya karena kemauan satu pihak saja, ataupun terjadinya terjadinya sepakat maksudnya adalah bahwa dua belah pihak yang mengadakan perjanjian dengan kata lain mereka saling menghendaki sesuatu yang secara timbal balik.⁷⁾

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum ada dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotaanggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang sudah

⁷⁾ Niru Anita Sinaga, 2019. Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10 (1). hlm. 6, diakses pada tanggal 20 Desember 2022. Doi : <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>

dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah.⁸⁾

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi “hal tertentu”, yang maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki obyek (*bepaald onderwerp*) tertentu, yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Prestasi itu sendiri bisa merupakan perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut pasal 1333 KUH Perdata “barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau ditentukan”. Dengan demikian perjanjian yang objeknya tidak tertentu atau jenis yang tidak tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek atau jenis objek merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.⁹⁾

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dan sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpan dari ketentuan-ketentuan perundangundangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.¹⁰⁾

Perjanjian kredit yang dilakukan antara kreditur dan debitur pada dasarnya merupakan perikatan diantara kedua pihak tersebut. dalam hal ini perikatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pemberian kredit. Pemberian kredit perbankan dilakukan setelah terlebih dahulu ada perikatan antara debitur

⁸⁾ Lukman Santo Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Penebar Media Pustaka. hlm.52.

⁹⁾ Abdul Hakim Siagian. 2020. *Hukum Perdata*. Medan : Pustaka Prima. hlm.115-116.

¹⁰⁾ Martha Eri Saifira. *Op.Cit*. hlm.89

dan kreditur. Perikatan ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang disebut perjanjian kredit.¹¹⁾

Jika perjanjian tersebut tidak terpenuhi atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan maka akan dikatakan bahwa ia wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (Bandingkan : *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).¹²⁾ Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah, pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata, bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga (3) keadaan itu:¹³⁾

- a. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
- b. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.

¹¹⁾ Giska Matahari Gegana. 2011. Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20233738-S253-Penerapan%20prinsip.pdf>

¹²⁾ Subekti. *Ibid.* hlm. 45.

¹³⁾ Martha Eri Safira. *Op.Cit.* hlm. 108.

- c. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- d. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian debitur atau sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :¹⁴⁾

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh debitur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak, diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.¹⁵⁾

Adapun Dalam perjanjian ketentuan dan syarat yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perlu dirumuskan. Rincian hak dan kewajiban para pihak adalah bagian yang merupakan perumusan yang sesungguhnya dari suatu transaksi bisnis. Penyusunan ketentuan hak dan kewajiban para pihak ini memerlukan kejelian dan kecermatan yang terlatih. Dalam perancangan perjanjian dituntut untuk memahami transaksi bisnis tidak hanya dari aspek teoritis normatif akan tetapi dari sisi empiris dengan melakukan kunjungan lapangan sehingga dapat memahami secara utuh pangkal pokok dan rincian transaksi bisnis tersebut. Hubungan antara hak dan kewajiban serta perangkat hak dan kewajiban di antara para pihak seharusnya merupakan hubungan yang logis. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa perangkat hak adalah

¹⁴⁾ Subekti. *Op. Cit.* hlm. 45.

¹⁵⁾ *Ibid.*

berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban.¹⁶⁾ Misalkan, dalam perjanjian pinjam meminjam, berdasarkan kesepakatan maka apabila pinjaman telah diperoleh dengan jangka waktu, maka pihak yang menerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada yang memberi pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Apabila dikaitkan dengan definisi perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan “hak” implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya.¹⁷⁾ Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-ukuran (kriteria) tertentu.

3.2. Pelaksanaan peminjaman modal oleh nasabah di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong dihubungkan dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara (Studi Kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya)

Usaha pendayagunaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pembuangan limbah kegiatan industri, harus tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi lingkungan serta kemampuan daya dukung lingkungan sehingga tidak merusak kelestarian fungsi lingkungan, hal ini sebagaimana bunyi pasal pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian

¹⁶⁾ Niru Anita Sinaga. *Op.Cit.* hlm.16

¹⁷⁾ *Ibid.* hlm.16-17.

fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Melalui wawancara dengan ibu Dedeh selaku nasabah melanjutkan bahwa mekanisme peminjaman modal oleh nasabah di PT PNM Mekaar Syariah Bantarkalong hal pertama adalah mengajukan permohonan pembiayaan yakni minimal 10 orang untuk satu kelompok di daerah domisil dengan mendatangi petugas dari pihak PT. PNM Mekaar Syariah. mempersiapkan semua berkas syarat pinjaman serta mengisi formulir pengajuan. Kemudian pihak PNM akan melakukan survey untuk mengecek usaha yang dijalani, jika telah memenuhi persyaratan pencairan pinjaman modal pertama yang diberikan adalah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Setelah melakukan peminjaman modal tersebut maka nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran yang sudah disepakati. Pembayaran angsuran dilakukan secara kredit dengan lama angsuran adalah sebanyak 50 minggu atau 1 tahun 2 minggu yang dibayar seminggu sekali setiap hari Kamis bertepatan dengan pertemuan kelompok yang wajib dilaksanakan.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Ayis selaku nasabah memaparkan saat akan memberikan uang pinjaman modal selain membawa persyaratan juga diharuskan membawa materai yang nantinya digunakan pada formulir peminjaman modal yang didalamnya juga terdapat perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AO (*Account Officer*) dan nasabah PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan peminjaman modal perlu terpenuhinya persyaratan yang terdiri atas :

1. Perempuan umur 18-63 Tahun;
2. Modal kerja untuk usaha atau buka usaha;
3. Fotocopy KTP/Surat Keterangan Domisili;
4. Fotocopy Kartu Keluarga;
5. Fotocopy KTP suami;

6. Membuat kelompok minimal 10 orang di lingkungan yang sama dengan satu ketua kelompok

Adapun mekanisme peminjaman modal di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong terdiri atas :

- Sosialisasi merupakan tahap yang pertama bagi nasabah atau kelompok baru sebagai bentuk identifikasi apakah nasabah tersebut memenuhi syarat atau tidak.
- Uji kelayakan atau *survey* adalah kegiatan untuk melihat kondisi ekonomi sosial calon nasabah dengan mengunjungi rumah nasabah secara langsung untuk mengetahui kondisi rumah dan pendapatannya serta melakukan wawancara terhadap nasabah jika sebelumnya nasabah memberitahukan kepada pihak PNM akan melakukan pinjaman modal.
- Verifikasi oleh kepala cabang untuk mengecek dan memastikan data nasabah secara langsung di lapangan dengan membawa data nasabah yang sudah dilakukan proses uji kelayakan.
- Persiapan pembiayaan yang berisi kegiatan pemberitahuan mengenai prosedur dan aturan yang diberlakukan oleh pihak PNM.
- Pengajuan pencairan dana dengan jangka waktu paling lambat seminggu sebelum pencairan dengan mempersiapkan semua berkas syarat pinjaman serta mengisi formulir pengajuan.
- Pencairan dana sekaligus penandatanganan perjanjian di atas meterai sebagai bentuk bahwa nasabah siap bertanggungjawab atas dana tersebut.

Setelah melakukan peminjaman modal tersebut maka nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran yang sudah disepakati. Pembayaran angsuran dilakukan secara kredit dengan lama angsuran adalah sebanyak 50 minggu atau 1 tahun 2 minggu yang dibayar seminggu sekali bertepatan dengan pertemuan kelompok yang wajib dilaksanakan.

Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Pasal tersebut menjelaskan perjanjian yang sudah dibuat akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan ditandatanganinya perjanjian oleh nasabah di atas meterai menjadi sebuah bukti bahwa nasabah sudah berhak atas pinjaman modal dengan kewajiban yang harus dipenuhinya. Pada dasarnya tujuan dari para pihak membuat perjanjian tentu agar kesepakatan yang disebutkan dalam isi perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Setelah bantuan modal usaha dari Program Mekaar Syariah sudah disalurkan, tentunya ada kewajiban penerima modal selaku debitur yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal tersebut. Jika tidak terpenuhinya salah satu perjanjian maka akan menimbulkan wanprestasi.

3.3. Kendala-kendala yang menyebabkan nasabah wanprestasi di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong (Studi Kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sumiarsih selaku nasabah memaparkan bahwa yang menjadi kendala dalam keterlambatan pembayaran angsuran adalah kurang lancarnya perekonomian seperti kondisi usaha yang menurun menyebabkan nasabah telat membayar angsuran.

Ibu Dedeh selaku nasabah juga memaparkan dalam wawancaranya bahwa kebutuhan perekonomian yang meningkat juga menjadi faktor penyebab pembayaran angsuran telat.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ayis selaku nasabah menambahkan bahwa banyaknya angsuran seperti pembayaran uang sekolah dan pembayaran pajak yang harus segera dibayar menyebabkan

waktu pembayarannya bentrok juga menjadi kendala dalam pembayaran angsuran tepat waktu.

Melalui wawancara dengan AO (*Account Officer*) dari pihak PNM memaparkan bahwa saat melakukan penagihan angsuran sering dijumpai nasabah yang tidak membayar angsurannya secara tepat waktu atau telat bayar dengan alasan penghasilan usahanya sedang tidak baik, kebutuhan ekonomi yang banyak, biaya angsurannya digunakan untuk kebutuhan lain seperti membayar sekolah, membayar listrik, ataupun membayar pinjaman ke bank lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AO (*Account Officer*) dan nasabah PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong dapat diketahui bahwa kendala yang menyebabkan nasabah mengalami kredit macet diantaranya :

1. Kurang lancarnya perekonomian pada nasabah;
2. Peningkatan kebutuhan keluarga seperti untuk membayar uang sekolah anak dan membayar angsuran rumah maupun kendaraan;
3. Mengalami kendala dalam menjalankan usahanya sehingga berpengaruh pada pendapatannya.

3.4. Upaya-upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong dihubungkan dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara (Studi Kasus Di Desa Sirnagalih Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan AO (*Account Officer*) memaparkan saat nasabah terlambat membayar angsurannya maka kelompok akan turut serta bertanggungjawab dengan dilakukannya tanggung renteng, namun apabila nasabah terus menerus terlambat membayar angsurannya pihak PNM akan menagihnya secara langsung. Adapun upaya lainnya jika

nasabah tidak dapat dihubungi dapat dengan menghubungi kerabat dekat atau kerabat yang menjadi penjamin untuk menemukan itikad baik dari nasabah. Kerabat dekat yang menjadi penjamin dapat diminta pertanggungjawabannya dikarenakan penjamin juga turut serta menandatangani formulir pengajuan pinjaman modal sebagai orang yang menjamin calon nasabah. Bisa juga dengan mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu secara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*). Upaya lain juga tercantum dalam isi perjanjian bahwa jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, bila diperlukan bisa sampai ke pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa upaya yang dapat di dilakukan jika nasabah wanprestasi di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong adalah dengan :

1. Tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban kelompok apabila ada nasabah yang wanprestasi;
2. Menghubungi kerabat dekat atau kerabat yang menjadi penjamin jika nasabah tidak dapat dihubungi;
3. Mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu secara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*);
4. Secara musyawarah dan kekeluargaan;
5. Pengadilan Agama;

Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dapat di dilakukan jika nasabah wanprestasi di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong adalah dengan tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban

kelompok apabila ada nasabah yang wanprestasi, menghubungi kerabat dekat atau kerabat yang menjadi penjamin jika nasabah tidak dapat dihubungi, mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu secara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*), serta secara musyawarah dan kekeluargaan, atau melalui Pengadilan Agama sesuai dengan isi akad;

Pemberlakukan sistem tanggung renteng sebagai upaya penyelamatan kredit macet yaitu apabila ada salah satu anggota dalam kelompok tersebut tidak membayar di waktu pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok tersebut wajib menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut, dan angsuran anggota yang sudah ditalang tersebut selanjutnya harus dikembalikan ke si penalang pada minggu berikutnya. Kemudian apabila salah satu anggota berhenti melakukan pembayaran kredit atau kabur dengan berpindah rumah tanpa memberikan kabar kepada anggota dalam kelompoknya maka kelompok bertanggung jawab membayar sisa dari hutang yang ditinggalkan dengan cara sisa utang dibagi kepada masing-masing anggota dalam kelompok tersebut. Pasal 1278 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Adapun upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan jika nasabah wanprestasi tercantum dalam pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak yang perjanjiannya tidak dipenuhi, dapat memilih atau memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih

dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Dari pasal 1267 KUHPerdara tersebut, dapat disimpulkan alternatif untuk melakukan upaya hukum yang perjanjiannya tidak terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian atau;
2. Meminta ganti rugi;
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atau;
4. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian; sekaligus meminta ganti rugi.

Upaya alternatif lainnya dengan berpedoman terhadap beberapa peraturan Bank Indonesia yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu :

- a) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;
- b) Persyaratan Kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pendaftaran, perubahan jumlah angsuran serta perubahan jangka waktu;
- c) Penataan Kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain, meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akan pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dan konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada

perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *resconditioning*.

Upaya yang dapat dilakukan lainnya adalah dengan dilakukan sesuai dengan isi akad seperti upaya berupa musyawarah, mediasi Perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain serta melalui peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peminjaman modal di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong belum terpenuhi sebagaimana mestinya karena masih ada nasabah yang lalai akan kewajibannya. Adapun persyaratan peminjaman modal terdiri atas perempuan umur 18-63 tahun, modal kerja untuk usaha atau buka usaha, fotocopy KTP/Surat Keterangan Domisili, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP suami, dan membuat kelompok minimal 10 orang di lingkungan yang sama dengan satu ketua kelompok. Adapun mekanisme peminjaman modal di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong terdiri atas sosialisasi, uji kelayakan atau *survey*, verifikasi, persiapan pembiayaan, pengajuan pencairan dana, terakhir pencairan dana sekaligus penandatanganan perjanjian di atas meterai sebagai bentuk bahwa nasabah siap bertanggungjawab atas dana tersebut. setelah melakukan peminjaman modal tersebut maka nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran yang sudah disepakati. pembayaran angsuran dilakukan secara kredit dengan lama angsuran adalah sebanyak 50 minggu atau 1 tahun 2 minggu yang dibayar seminggu sekali bertepatan dengan pertemuan kelompok yang wajib dilaksanakan.

2. Kendala-kendala yang menyebabkan nasabah wanprestasi di antaranya karena faktor internal yang menyebabkan nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu disebabkan oleh permasalahan yang dihadapi oleh nasabah misalnya kurang lancarnya perekonomian pada nasabah sehingga kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah berdampak terhadap terjadinya kredit macet yang dialami, ada juga nasabah yang terlambat dalam membayar karena peningkatan kebutuhan keluarga seperti keluarga memiliki keperluan untuk membayar uang sekolah anak dan membayar angsuran rumah maupun kendaraan. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan permasalahan tersebut diantaranya aspek pasar yang kurang mendukung, kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, pengaruh lain di luar usaha, kenakalan peminjam atas dana pembiayaan yang diterima seperti menggunakan dana untuk keperluan diluar perjanjian.
3. Upaya yang dapat di dilakukan jika nasabah wanprestasi di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong adalah dengan tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban kelompok apabila ada nasabah yang wanprestasi, menghubungi kerabat dekat atau kerabat yang menjadi penjamin jika nasabah tidak dapat dihubungi, mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu secara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*), serta secara musyawarah dan kekeluargaan dan melalui Pengadilan Agama.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Dalam pelaksanaan peminjaman modal, PT.PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong selaku kreditur harus lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah dan selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Karena faktor

terjadinya pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar ini salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab anggota terhadap perjanjian pembiayaan tersebut, maka dari itu perlu adanya penyuluhan terkait dengan urgensi tanggung jawab yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik.

2. Untuk kendala yang menyebabkan nasabah wanprestasi, nasabah harusnya lebih memahami bahwa dana yang diberikan adalah untuk usaha bukan untuk yang lain, apabila modal atau dana tersebut digunakan untuk keperluan lain maka hal itu tentunya akan berakibat pada pengembalian pinjaman dan pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik serta hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi Adapun pihak kreditur harus lebih selektif lagi dalam mencari nasabah untuk diberikan pinjaman modal sehingga pinjaman yang diberikan sesuai dengan tujuan dari PT PNM mekaar Syariah Cabang Bantarkalong.
3. Untuk upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit, pihak PT.PNM mekaar Syariah Cabang Bantarkalong dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah, agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sudah mengetahui dan bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menghindari adanya wanprestasi. Pihak nasabah juga dapat menyampaikannya kepada PT.PNM Mekaar Syariah Cabang Bantarkalong mengenai kendala yang dihadapinya sehingga bisa dicarikan jalan keluar agar kredit tersebut bisa medapat solusi atas kendala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Siagian. 2020. *Hukum Perdata*. Medan : Pustaka Prima.
- Lukman Santo Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Penebar Media Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.

- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo : CV. Nata Karya.
Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
Subekti, Tjitrosudibio. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.

B. Jurnal

- Giska Matahari Gegana. 2011. Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20233738-S253-Penerapan%20prinsip.pdf>
- Niru Anita Sinaga, 2019. Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10 (1). hlm. 6, diakses pada tanggal 20 Desember 2022. Doi : <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>
- Rahmani Timorita Yulianti. 2008. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1), 91. Diakses 31 Juli 2023. Doi : <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>
- Vina Yusepa Diana. 2022. Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah. skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. hlm.4. <http://repository.radenintan.ac.id/19205/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>